

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah mengatur tentang....
 - A. Komnas HAM
 - B. Pemberantasan korupsi
 - C. Pengadilan HAM
 - D. Hak asasi manusia
 - E. Pidana pencucian uang

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai tugas pokok, antara lain....
 - A. Membentuk perundang undangan tentang HAM
 - B. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
 - C. Melindungi anak anak dari kekerasan
 - D. Mengatasi masalah masalah keluarga
 - E. Memantau pelaksanaan HAM di Indonesia

3. Hak mendapat perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penahanan, pengeledahan, peradilan, ataupun pembelaan hukum adalah HAM dalam bidang....
 - A. Property rights
 - B. Procedural rights
 - C. Rights and legal equality
 - D. Political rights
 - E. Social and culture rights

4. Salah satu contoh HAM bagi bangsa Indonesia yang bersifat pribadi, adalah....
 - A. Memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan.
 - B. Mendirikan suatu perusahaan dan mengelolanya
 - C. Menjadi kandidat dalam suatu pemilihan ketua
 - D. Tampil istimewa mengekspreikan hasil karya seni
 - E. Menciptakan suatu model yang akan diikuti orang lain

5. Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia yang lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dan menjadi piagam HAM dunia adalah....
 - A. Declaration of Independence
 - B. Universal Declaration of Human Rights
 - C. Magna Charta
 - D. Rights of Determination
 - E. Bill of Rights

6. Faktor factor penghambat dalam rangka upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, adalah....
 - A. Kurangnya aparat penegak hukum yang bertugas

- B. Pengetahuan masyarakat tentang hukum rendah
- C. Kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah
- D. Masih berlakunya sebagian hukum adat daerah
- E. Hukum penjajahan dianggap masih berlaku

7. Nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) dan menjadi pedoman hidup serta kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila disebut landasan....

- A. Ideal
- B. Konstitusional
- C. Konvensional
- D. Struktural
- E. Operasional

8. Konsep HAM yang bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab seperti berikut....

- A. Jaminan kepada setiap manusia untuk melaksanakan ibadah (agama) sesuai dengan keyakinannya
- B. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
- C. Kesadaran berbangsa yang punya martabat ingin sederajat dengan bangsa lain di dunia dan terbebas dari belenggu penjajahan
- D. Terlaksananya kedaulatan rakyat yang demokratis yang menjamin hak-hak sipil dan politik untuk mencapai tegaknya HAM
- E. Kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dharma baktinya

9. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sila Persatuan Indonesia adalah....

- A. Mengakui persamaan derajat, harkat, martabat manusia
- B. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
- C. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- D. Tidak memaksakan agama kepada orang lain
- E. Musyawarah mufakat dalam segala urusan

10. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya adalah....

- A. Tidak dapat dicabut
- B. Tidak dapat dibagi
- C. Hakiki
- D. Universal
- E. Internasional

11. Kejahatan genosida adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Cara yang digunakan seperti berikut, kecuali....

- A. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagian maupun seluruhnya
- B. Berbuat yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
- C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik, baik seluruh atau pun sebagian
- D. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

12. Proses peradilan HAM berat dimulai sejak dilakukan penyelidikan adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM berat. Penyelidikan dilakukan oleh....

- A. Jaksa Agung Republik Indonesia
- B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- C. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan
- D. Kepolisian Republik Indonesia
- E. Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah....

- A. 3 orang hakim
- B. 4 orang hakim
- C. 5 orang hakim
- D. 7 orang hakim
- E. 9 orang hakim

14. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, bebas dari KKN, dan beberapa tuntutan lainnya dilakukan mahasiswa dengan demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa dari pihak mahasiswa adalah kasus....

- A. Daerah operasi militer (DOM) Aceh
- B. Marsinah
- C. Semarang dan Surabaya
- D. Semanggi dan Trisakti
- E. Tanjung Periok

15. Dalam rangka upaya penegakan HAM di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-undang Peradilan HAM yaitu....

- A. Undang undang No 39 tahun 1999

- B. Undang undang No 26 tahun 2000
- C. Undang undang No 32 tahun 2004
- D. Keputusan Presiden No 129
- E. Tap MPR No XVII/MPR/ 1998

16. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, adalah pengertian demokrasi menurut pendapat....

- A. Koentjoro poerbopranoto
- B. John Locke
- C. Aristoteles
- D. Abraham Lincoln
- E. Dardji Darmodihardjoi

17. Sebelum suatu kebijakan digunakan, seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama berperan serta agar menyampaikan pandangan mereka agar diketahui oleh anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. Pernyataan tersebut merupakan proses demokratisasi....

- A. Partisipasi aktif
- B. Persamaan suara
- C. Pemahaman yang jelas
- D. Pengawasan agenda
- E. Pencakupan orang dewasa

18. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi disebut demokrasi....

- A. Langsung D. Konstitusional
- B. Material E. Proletar
- C. Formal

19. Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Hal tersebut tercantum dalam....

- A. Pasal 2 ayat (1) D. Pasal 1 ayat (1)
- B. Pasal 2 ayat (2) E. Pasal 1 ayat (2)
- C. Pasal 2 ayat (3)

20. Demokrasi Pancasila bersumber pada....

- A. Warisan para penjajah indonesia
- B. Kepribadian bangsa indonesia
- C. Demokrasi negara-negara lain

- D. Perpaduan demokrasi dari berbagai Negara
- E. Pengalaman pada zaman dahulu kala

21. Bagi bangsa Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila bertujuan untuk....

- A. Menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap berdemokrasi yang seharusnya
- B. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
- C. Menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional
- D. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
- E. Mengakui adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara

22. Prinsip utama dalam demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah....

- A. Beriman dan bertaqwa sesuai dengan keadaan
- B. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- C. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- D. Berkedaulatan serta kesinambungan rakyat
- E. Demokratis dan menerapkan rule of law

23. Penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama (5 Juli 1950 – 11 Maret 1966) sebagai berikut, kecuali....

- A. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- B. Pembentukan lembaga negara yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
- C. Dibubarkannya DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno
- D. Penyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif yakni terbentuknya poros Jakarta-Beijing-Pyongyang
- E. Terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali, akibat mosi tidak percaya dari parlemen.

24. Demokrasi pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat memperjuangkan kepentingan....

- A. Golongan minoritas
- B. Partai pemenang pemilu
- C. Aparat penegak hukum
- D. Seluruh rakyat indonesia
- E. Para wakil rakyat seluruhnya

25. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 jo UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu, ditegaskan bahwa pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya tanpa perantara sesuai kehendak hati nuraninya. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas....

- A. Langsung
- B. Umum
- C. Bebas
- D. Rahasia
- E. Jujur dan bermartabat

26. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 terdiri atas....

- A. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang
- B. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
- C. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
- D. Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
- E. Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang

27. Kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kepada....

- A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- B. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)
- C. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
- D. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan
- E. Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

28. Istilah gotong royong bagi masyarakat lampung adalah....

- A. Hoyak tabuik
- B. Muli meghanai
- C. Batabo
- D. Sakai sambaian
- E. Begawi

29. Ciri khas demokrasi pancasila adalah....

- A. Transparansi
- B. Kreativitas
- C. Kesenjangan sosial
- D. Kebebasan individu
- E. Kegotongroyongan

30. Perhatikan uraian berikut !

- a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - b. Peraturan itu diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 - c. Peraturan bersifat memaksa
 - d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas
- Fokus perhatian uraian tentang hukum tersebut mengenai....

- A. Tujuan hukum
- B. Ciri-ciri hukum
- C. Unsur-unsur hukum
- D. Fungsi hukum
- E. Hakikat hukum

31. Prinsip Negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah....

- A. Setiap manusia mempunyai hak yang bebas
- B. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas
- C. Para menteri bertanggung jawab kepada peneiden
- D. Adanya lembaga peradilan yang bebas tidak memihak
- E. Para hakim dan jaksa bebas berpendapat

32. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal....

- A. Pasal 24 ayat 1
- B. Pasal 24 ayat 2
- C. Pasal 1 ayat 1
- D. Pasal 1 ayat 2
- E. Pasal 1 ayat 3

33. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum adalah hukum....

- A. Pidana D. Administrasi Negara
- B. Perdata E. Acara Pidana
- C. Tata Negara

34. Hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris merupakan bagian dari hukum....

- A. Acara Perdata D. Formal
- B. Perdata E. Material
- C. Subjektif

35. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara

yang serupa disebut sumber hukum....

- A. Undang-Undang D. Doktrin
- B. Custom (kebaisaan) E. Yurisprudensi
- C. Traktat

36. Berikut ini yang bukan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah....

- A. Peradilan Agama
- B. Peradilan Militer
- C. Peradilan Tata Usaha Negara
- D. Mahkamah konstitusi
- E. Peradilan Umum

37. Pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada dikotamadya atau kabupaten seluruh Indonesia adalah....

- A. Peradilan Negeri
- B. Peradilan Militer
- C. Peradilan Agama
- D. Peradilan Militer
- E. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara

38. Pengadilan militer yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding adalah pengadilan....

- A. Militer
- B. Militer Tinggi
- C. Militer Utama
- D. Militer Pertempuran
- E. Militer Pertahanan

39. Negara hukum sering disebut juga dengan istilah....

- A. Machstaat D. Rechtaats
- B. Doktrin E. Monarkhi
- C. Statue

40. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dan sekaligus lembaga peradilan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan MK diatur dalam....

- A. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 dan UU No. 24 Tahun 2004
- B. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 A dan UU No. 24 Tahun 2004
- C. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 B dan UU No. 24 Tahun 2004

- D. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C dan UU No. 24 Tahun 2004
- E. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004